

## **ANALISIS BIAYA PENDIDIKAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN MUTU PENDIDIKAN PADA SMP NEGERI 2 SUKASADA TAHUN PELAJARAN 2013/2014**

Nur Fadillah, Anak Agung Gede Agung, I Made Yudana

Program Studi Administrasi Pendidikan, Program Pascasarjana  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

e-mail: {nur.fadillah, gede.agung, made.yudana}@pasca.undiksha.ac.id

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis biaya pendidikan dan hubungannya dengan mutu pendidikan pada SMP Negeri 2 Sukasada. Rancangan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah rancangan penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan penelitian *ex-post facto*. Sampel penelitian adalah 134 orang. Pengumpulan data tentang biaya pendidikan diperoleh dari pengumpulan dokumen anggaran sekolah, sedangkan untuk data mutu pendidikan diperoleh dari studi dokumentasi berupa prestasi akademik dan non akademik. Langkah-langkah analisis data meliputi editing, coding, scoring dan tabulating. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Besaran satuan biaya pendidikan SMP Negeri 2 Sukasada yang Bersumber dari Pemerintah pada Tahun Pelajaran 2013/2014 adalah sebesar Rp. 398.302.733, (2) Total biaya (*total cost*) yang diperlukan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri 2 Sukasada yang bersumber dari Pemerintah pada Tahun Pelajaran 2013/2014 adalah sebesar Rp. 388.002.919, (3) Satuan biaya pendidikan per siswa (*unit cost*) pada SMP Negeri 2 Sukasada Tahun Pelajaran 2013/ 2014 adalah sebesar Rp. 718.992.26, (4) Peningkatan biaya pendidikan SMP Negeri 2 Sukasada dapat meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 2 Sukasada dari tahun pelajaran 2011/2012 Sampai dengan 2013/2014. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan anggaran sebesar 5,77% dari tahun sebelumnya maka mutu pendidikanpun mengalami peningkatan dengan berada pada kategori baik serta tercermin dari peningkatan prestasi akademik maupun non akademik.

*Kata kunci:* analisis biaya pendidikan, mutu pendidikan

### **Abstract**

This study aimed to analyze the cost of education and its relationship with the quality of education at SMP Negeri 2 Sukasada. The research design used in this research is descriptive quantitative research design approach *ex-post facto* research. The sample was 134 people. The collection of data on the cost of education by the collection of school budget documents, while the quality of education for the data obtained from the study documentation of academic and non-academic achievement. The steps of data analysis include editing, coding, scoring and tabulating. The results showed that: (1) The amount of the unit cost of education in SMP Negeri 2 Sukasada originating from the Government on the Academic Year 2013/2014 is Rp. 398 302 733, (2) Total cost (*total cost*) needed to finance the provision of education in SMP Negeri 2 Sukasada from the Government on the Academic Year 2013/2014 is Rp. 388 002 919, (3) Unit cost of education of student (*unit cost*) in SMP Negeri 2 Sukasada academic year 2013/2014 is Rp. 718.992.26, (4) The increase in the cost of education of SMP Negeri 2 Sukasada can improve the quality of education in SMP Negeri 2 Sukasada on the Academic Year 2011/2012 Up to 2013/2014. This is evidenced by the increased budget of 5.77% from the previous year. It has increased the quality of education in the category as well as reflected in the progressive increase in academic and non academic achievement.

*Keywords:* analysis of the cost of education, quality of education

## PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat dan bangsa. Menurut Soekidjo Notoatmodjo, bahwa pendidikan merupakan segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan. Sedangkan definisi pendidikan dalam perspektif kebijakan, kita telah memiliki rumusan formal dan operasional, sebagaimana tercantum dalam UU No 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS, bahwa pengertian pendidikan adalah “usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara”. Lebih lanjut dalam pasal 3 dijelaskan, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Menurut epistemologi, Zaharai Idris (dalam Naufal El Hakim, 2013), mengatakan bahwa Pendidikan ialah serangkaian kegiatan komunikasi yang bertujuan, antara manusia dewasa dengan si anak didik secara tatap muka atau dengan menggunakan media dalam rangka memberikan bantuan terhadap perkembangan anak seutuhnya.

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah menetapkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan pemerintah. Salah satu Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 menetapkan tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan. Dalam penjelasan PP No. 19 Tahun 2005 Pasal 11 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah mengkategorikan sekolah atau madrasah yang telah atau hampir memenuhi standar nasional ke dalam Sekolah Kategori Mandiri.

Sekolah merupakan salah satu lembaga penyelenggara pendidikan formal, yang berusaha membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, yang tidak bisa dipenuhi sendiri oleh masyarakat. Sekolah sebagai penyelenggara pendidikan mengemban tugas untuk mendidik para siswanya yang sedang dalam masa perkembangan menuju ke arah kedewasaan untuk mencapai perubahan-perubahan positif baik berkenaan dengan pengetahuan, sikap maupun keterampilannya. Dengan kata lain, penyelenggaraan pendidikan di sekolah mengacu kepada pembentukan pribadi siswa yang matang dan mampu berdiri sendiri. Seiring proses berjalannya waktu individu berkembang dan mempelajari setiap hal yang ada di lingkungannya dan membentuk suatu persepsi-persepsi dengan didasari oleh penglihatan, pendengaran, dan perasaannya terhadap lingkungan. Sekolah sebagai penyelenggara pendidikan mempunyai dua fungsi yaitu (1) sebagai *partner* masyarakat dan (2) sebagai penghasil tenaga kerja. Sekolah sebagai *partner* masyarakat akan dipengaruhi oleh corak pengalaman seseorang di dalam lingkungan masyarakat. Sekolah juga berkepentingan terhadap perubahan lingkungan seseorang di dalam masyarakat. Perubahan lingkungan itu antara lain dapat dilakukan melalui fungsi layanan bimbingan, penyediaan forum komunikasi antara sekolah dengan lembaga sosial lain dalam masyarakat. Sebaliknya partisipasi sadar seseorang untuk selalu belajar dari lingkungan masyarakat, sedikit banyak juga dipengaruhi oleh tugas-tugas belajar serta pengarahan belajar yang dilaksanakan di sekolah.

Hampir dapat dipastikan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya yang memadai. Implikasi diberlakukannya kebijakan desentralisasi pendidikan, membuat para pengambil keputusan sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan referensi tentang komponen pembiayaan pendidikan. Kebutuhan tersebut dirasakan semakin mendesak sejak dimulainya pelaksanaan otonomi daerah yang juga meliputi bidang pendidikan.

Jika ditinjau dari segi bahasa, biaya (*cost*) dapat diartikan pengeluaran, dalam istilah ekonomi, biaya atau pengeluaran dapat berupa uang atau bentuk moneter lainnya. Pengertian biaya dalam ekonomi adalah pengorbanan-pengorbanan yang dinyatakan dalam bentuk uang, diberikan secara rasional, melekat pada proses produksi, dan tidak dapat dihindarkan. Bila tidak demikian, maka pengeluaran tersebut dikategorikan sebagai pemborosan. Biaya pendidikan menurut Supriadi (dalam Aryanto, 2009), merupakan salah satu komponen instrumental (*instrumental-input*) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Biaya dalam pengertian ini memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga.

Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, biaya pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan. Ada dua hal penting yang perlu dikaji atau dianalisis dalam pembiayaan pendidikan, yaitu biaya pendidikan secara keseluruhan (*total cost*) dan biaya satuan per siswa (*unit cost*). Biaya satuan di tingkat sekolah merupakan *aggregate* biaya pendidikan tingkat sekolah, baik yang bersumber dari pemerintah, orang tua, maupun masyarakat yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam satu tahun pelajaran. Biaya satuan per siswa merupakan ukuran yang menggambarkan seberapa besar uang yang dialokasikan sekolah secara

efektif untuk kepentingan siswa dalam menempuh pendidikan. Oleh karena biaya satuan ini diperoleh dengan memperhitungkan jumlah siswa pada masing-masing sekolah, maka ukuran biaya satuan dianggap standar dan dapat dibandingkan antara sekolah yang satu dengan yang lainnya. Selain itu juga biaya yang dikeluarkan oleh siswa disebut juga biaya pribadi (*private cost*) atau biaya personal (*personal cost*) meliputi SPP (sebagai konsekuensi keberadaan sekolah swasta). Sedangkan biaya satuan pendidikan meliputi uang transport, pakaian seragam sekolah, alat tulis, buku, konsumsi, dan akomodasi.

Secara umum pembiayaan pendidikan adalah sebuah kompleksitas, yang didalamnya akan terdapat saling keterkaitan pada setiap komponennya, yang memiliki rentang yang bersifat mikro (satuan pendidikan) hingga yang makro (nasional), yang meliputi sumber-sumber pembiayaan pendidikan, sistem dan mekanisme pengalokasiannya, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaannya, akuntabilitas hasilnya yang diukur dari perubahan-perubahan yang terjadi pada semua tatanan, khususnya sekolah, dan permasalahan-permasalahan yang masih terkait dengan pembiayaan pendidikan, sehingga diperlukan studi khusus untuk lebih spesifik mengenal pembiayaan pendidikan ini.

Fattah (2000) menambahkan biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*). Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa seperti pembelian alat-alat pembelajaran, penyediaan sarana pembelajaran, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan pemerintah, orang tua maupun siswa sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang yang dikorbankan oleh siswa selama belajar, contohnya: uang jajan siswa, pembelian peralatan sekolah (pulpen, tas, buku tulis, dan lain-lain).

Dalam penyelenggaraan pendidikan baik ditingkat makro (negara) maupun di tingkat mikro (lembaga), pembiayaan

merupakan unsur yang mutlak harus tersedia. Sebagai contoh, pemerintah Republik Indonesia sesuai amanat Undang-Undang setiap tahunnya telah mencanangkan alokasi anggaran pendidikan sebesar minima 20% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), demikian pula pemerintah daerah setiap tahun menetapkan anggaran untuk pendidikan seperti untuk gaji guru dan gaji tenaga kependidikan lainnya di daerah. Dalam konteks lembaga atau organisasi, sekolah setiap tahun menyusun Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) yang menunjukkan bagaimana perencanaan pendapatan dan penggunaan biaya untuk keperluan operasional sekolah. Penggunaan biaya tersebut menggambarkan pola pembiayaan dalam pendidikan. Dengan demikian pada semua tingkatan penyelenggaraan pendidikan pembiayaan merupakan hal yang sangat penting untuk turut menjamin terlaksananya pendidikan.

Mahalnya biaya pendidikan selalu menjadi masalah antara lembaga penyelenggara pendidikan yang menaikkan biaya pendidikan dengan pertimbangan biaya operasional yang tentu saja akan berdampak pada kemampuan finansial masyarakat. Hal ini menuntut strategi pengelolaan pembiayaan pendidikan baik di masyarakat maupun lembaga penyelenggara pendidikan. Pengelolaan berasal dari kata manajemen (administrasi). Manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur, mengurus atau mengelola. Banyak definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli. Keseluruhannya mengarah pada pengertian bahwa manajemen merupakan sebuah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Manajemen memberikan rumusan bahwa manajemen yaitu: Proses untuk mencapai tujuan organisasi dengan melakukan kegiatan dari empat fungsi utama yaitu merencanakan (*planning*), mengorganisasi (*organizing*), memimpin (*leading*), dan mengendalikan (*controlling*). Dengan demikian, manajemen adalah sebuah kegiatan yang berkesinambungan.

Manajemen pendidikan merupakan rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerja sama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara berencana dan sistematis yang diselenggarakan pada lingkungan tertentu, terutama dalam bentuk lembaga pendidikan yang bersifat formal. Sedangkan pembiayaan dapat didefinisikan sebagai kemampuan interval sistem pendidikan untuk mengelola dana pendidikan dengan efisien. Pembiayaan muncul sebagai input yang digunakan untuk setiap kegiatan pendidikan. Tidak hanya terkait dengan mengetahui ataupun menganalisa sumber dana, melainkan juga bagaimana cara penggunaan dana yang efektif dan efisien. Maka dapat didefinisikan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan adalah segenap kegiatan yang berkenaan dengan penataan sumber, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan. Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Dalam pengimplementasiannya sangat menuntut kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah.

Untuk memperjelas pembiayaan pendidikan di Indonesia, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Pada pasal 2 ayat 1 menyebutkan pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud adalah peserta didik, orang tua atau wali peserta didik, dan pihak lain yang mempunyai peranan dalam bidang pendidikan.

Analisis biaya pendidikan juga merupakan faktor penting dalam penyajian informasi tentang pendapatan dan pengelolaan sumber pendapatan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Juanda (2004:35) bahwa analisis biaya studi setiap siswa (*unit cost analysis*) merupakan variabel diterminan dalam mewujudkan

akuntabilitas keuangan lembaga pendidikan. Analisis *unit cost* dapat menjadi acuan dasar bagi lembaga dalam memperhitungkan biaya pendidikan seseorang selama mengikuti pendidikan di sekolah tersebut. Perhitungan *unit cost* harus mencakup seluruh kegiatan pendidikan baik yang berhubungan langsung maupun tidak dengan siswa. *Unit cost* akan menjelaskan dengan detail tentang beban siswa selama belajar di lembaga pendidikan. Beban *unit cost* setiap siswa tersebut, akan ditandingkan (*matching*) dengan subsidi pendidikan pemerintah, sumbangan (partisipasi) masyarakat, dan pendapatan lain-lain lembaga, sehingga dapat diketahui beban yang harus ditanggung oleh siswa selama studi. Sehingga, *unit cost* akan digunakan sebagai landasan akuntabilitas keuangan sekolah pada publik dan menjadi dasar pengambilan keputusan untuk menciptakan aktifitas penambah nilai.

Oleh karena itu perlu dilaksanakan penelitian yang mendalam tentang satuan biaya pendidikan agar dapat menjamin terselenggaranya proses peningkatan mutu pendidikan yang berkualitas. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti menganggap penting untuk meneliti tentang "Analisis Biaya Pendidikan dan Hubungannya dengan Mutu Pendidikan pada SMP Negeri 2 Sukasada Tahun Pelajaran 2013/2014".

## **METODE PENELITIAN**

Rancangan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah rancangan penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan penelitian *ex-post facto*. Rancangan ini dipilih karena sesuai dengan permasalahan yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Sistem pengumpulan data dilakukan dengan menggabungkan pendekatan objektivisme dan subjektivisme. Pendekatan objektivisme merupakan pengumpulan data yang berpedoman pada hasil yang telah dicapai, artinya data yang diperlukan sudah ada dalam dokumen yang telah disusun secara sistematis dan ilmiah. Pendekatan subjektivisme merupakan pengumpulan data yang berasal dari tes dan wawancara yang telah direncanakan

tentang variabel yang diteliti, serta menganalisis hasil evaluasi internal yang sudah dilaksanakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan gabungan antara pendekatan objektivisme dan pendekatan subjektivisme sesuai dengan tujuan penelitian.

Yang menjadi subjek/partisipan dalam penelitian ini adalah siswa, guru sebagai tenaga pendidik, serta tenaga kependidikan lain pada SMP Negeri 2 Sukasada tahun pelajaran 2013/2014 yang berjumlah 134 orang.

Variabel penelitian adalah suatu komponen dari kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang diputuskan oleh peneliti untuk dianalisis dan disimpulkan. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah: jumlah biaya pendidikan yang berasal dari pemerintah, *total cost*, dan *unit cost*. Sedangkan untuk variabel terikat dalam penelitian ini adalah mutu pendidikan dilihat dari *output* dan *outcome* sebagai akibat dari peningkatan pembiayaan pendidikan di SMP Negeri 2 Sukasada.

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut; 1) Pengumpulan dokumen dalam rangka memperoleh data tentang besaran biaya (*total cost* maupun *unit cost*) melalui rencana anggaran sekolah dan semua masukan dan pengeluaran pembiayaan pendidikan di SMP Negeri 2 Sukasada. 2) Mutu Pendidikan diperoleh melalui studi dokumentasi untuk melihat hasil pendidikan 2 tahun terakhir di SMP Negeri 2 Sukasada. Hasil pendidikan dapat berupa prestasi akademik, prestasi non akademik dan penyebaran siswa yang melanjutkan ke sekolah favorit.

Instrumen pengumpulan data adalah alat yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya (Arikunto, 2006 ; 134). Selanjutnya, yang diartikan alat merupakan sarana yang dapat diwujudkan dalam benda. Contohnya : angket (kuesioner), daftar cocok, skala, pedoman wawancara, lembar pengamatan, dan sebagainya.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian digunakan untuk menjawab

pertanyaan yang telah dirumuskan. Oleh karena data yang diperoleh akan dijadikan landasan dalam pengambilan kesimpulan, maka data yang dikumpulkan haruslah data yang benar.

Agar data yang dikumpulkan baik dan benar, pengumpulan datanya harus baik. Sesuai dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan di atas, maka instrumennya yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari kuesioner, panduan observasi, dokumentasi, dan pedoman wawancara.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa pencatatan dokumen dan kuesioner. Sebelum instrumen digunakan maka kualitasnya harus diteliti terlebih dahulu. Menurut Arikunto (2007: 64) menyatakan agar dapat memperoleh data yang valid instrumen atau alat untuk mengevaluasinya harus valid. Validitas atau kesahihan suatu perangkat tes adalah taraf sejauh mana perangkat tes itu mengukur apa yang seharusnya diukur. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas jika hasilnya sesuai dengan kriteria dalam arti memiliki kesejajaran antara hasil tes tersebut dengan kriteria. Selanjutnya hasil uji instrumen dari pakar diuji dengan analisis dari "Gregory".

Setelah dilakukan uji validasi oleh para ahli, kemudian instrumen yang dinyatakan relevan selanjutnya langsung bisa digunakan untuk penelitian. Dalam hal ini, untuk penelitian evaluasi yang tergolong penelitian kasus, setelah instrumen divalidasi oleh pakar/ahli (professional judgement), maka instrumen sudah bisa digunakan. Instrumen evaluasi tidak mungkin diujicobakan karena lokasi dan subyek penelitiannya memiliki karakteristik yang berbeda dengan lokasi dan subyek penelitian yang lainnya. Penelitian semacam *consus study* memiliki karakteristik yang berbeda dari segi obyek dan subyek penelitian (Arikunto, 2006 : 116).

Validasi yang diuji pada instrument ini meliputi : validasi isi, yakni kesanggupan alat ukur untuk mengukur yang seharusnya diukur, dan validasi konstruksi, yaitu kesanggupan alat ukur untuk mengukur

pengertian-pengertian yang terkandung dalam materi yang diukur.

Koefisien validasi dikatakan valid bila lebih besar dari 0,70 . yang merupakan koefisien minimal yang boleh digunakan. Validasi isi dilakukan dengan uji validasi dari pakar (*professional judgement*) yang dianalisis dengan rumus : "Gregory". Sebagai tim judges terhadap validasi isi dari instrument penelitian ini adalah dua orang pakar.

Pengukuran validitas instrumen tiap butir dalam penelitian ini, digunakan analisis item, yaitu dengan mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah skor tiap butir soal. Penentuan validitas butir soal yang berbentuk politomi digunakan rumus *korelasi product moment*.

Reliabilitas alat ukur adalah keterandalan alat ukur atau keajegan alat ukur, artinya kapanpun alat ukur itu digunakan akan menghasilkan hasil ukur yang relatif tetap. Tes yang baik adalah tes yang dapat dengan tetap (ajeg) memberikan data yang sebenarnya dengan kata lain dimanapun tes ini digunakan maka akan memberikan hasil yang sama. Uji reliabilitas instrumen dilakukan secara internal konsistensi yakni mencoba instrumen sekali saja kemudian butir yang telah dinyatakan valid berdasarkan uji validitas dengan *Alpha Cronbach*. Reliabilitas instrumen yang berbentuk angket dan *rating scale* diuji dengan rumus *Alpha Cronbach* (Koyan, 2011:135).

Metode analisis data pada penelitian ini melalui proses *editing*, kategorisasi/*coding*, *scoring* dan *tabulating*.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Besaran Satuan Biaya Pendidikan SMP Negeri 2 Sukasada yang Bersumber dari Pemerintah pada Tahun Pelajaran 2013/2014

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa sumber pendapatan untuk biaya pendidikan di SMP Negeri 2 Sukasada berasal dari Pemerintah yaitu berupa dana BOS. Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9

tahun yang bermutu. Dengan mempertimbangkan bahwa biaya operasional sekolah ditentukan oleh jumlah peserta didik dan beberapa komponen biaya tetap yang tidak tergantung dengan jumlah peserta didik. Untuk tahun anggaran 2013, Pemerintah menetapkan bahwa dana BOS yang akan diterima sebesar Rp. 710.000/ siswa/ tahun. Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 bulanan dalam 1 tahun anggaran, yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember.

Program BOS ini pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Sebagaimana yang tertuang dalam PP 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, bahwa biaya nonpersonalia yang dimaksud di sini adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dan lain-lain. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS, diantaranya untuk pembiayaan pengembangan perpustakaan, kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik baru, kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler peserta didik, kegiatan ulangan dan ujian, pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer, pengembangan profesi guru, membantu peserta didik miskin, pembiayaan pengelolaan BOS dan pembelian dan perawatan perangkat komputer. Dalam hal ini, telah ditetapkan batas maksimum penggunaan dana BOS untuk belanja pegawai (honor guru/tenaga kependidikan honorer dan honor-honor kegiatan) di sekolah negeri sebesar 20% dari total dana BOS yang diterima oleh sekolah dalam satu tahun anggaran.

Pada tahun pelajaran 2013/ 2014, SMP Negeri 2 Sukasada mendapatkan dana pendidikan yang bersumber dari dana BOS sebanyak Rp. 383.045.000 yang pencairannya dilakukan setiap 3 bulan sebanyak 4 tahap. Untuk pencairan

pertama dilaksanakan pada TW III tahun 2013 yaitu sebanyak Rp. 100.465.000 dengan perhitungan siswa sejumlah 566 orang. Untuk pencairan kedua dilaksanakan pada TW IV tahun 2013 yaitu sebanyak Rp. 91.235.000 dengan perhitungan siswa sejumlah 514 orang. Untuk pencairan ketiga dilaksanakan pada TW I tahun 2014 yaitu sebanyak Rp. 95.672.500 dengan perhitungan siswa sejumlah 539 orang. Untuk pencairan keempat dilaksanakan pada TW II tahun 2014 yaitu sebanyak Rp. 95.672.500 dengan perhitungan siswa sejumlah 539 orang. Dikarenakan adanya sisa dana BOS TW II tahun 2013 yang berjumlah Rp. 15.257.733, maka jika dana-dana tersebut diakumulasikan akan berjumlah Rp. 398.302.733, dengan prosentase realisasi penggunaan sebesar 97,41% dan yang tidak terealisasi sebesar 2,59%. Dengan kata lain dapat dinyatakan, bahwa Besaran Satuan Biaya Pendidikan SMP Negeri 2 Sukasada yang Bersumber dari Pemerintah pada Tahun Pelajaran 2013/2014 adalah sebesar Rp. 398.302.733.

## **2. Besaran Total Biaya (*total cost*) yang Diperlukan untuk Membiayai Penyelenggaraan Pendidikan di SMP Negeri 2 Sukasada yang Bersumber dari Pemerintah pada Tahun Pelajaran 2013/2014**

Prioritas utama penggunaan dana BOS adalah untuk kegiatan operasional sekolah meliputi 13 item pembelanjaan, yaitu: Pengembangan Perpustakaan, Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Kegiatan Pembelajaran dan Ekstra Kurikuler Peserta Didik, Kegiatan Ulangan dan Ujian, Pembelian Bahan-bahan Habis Pakai, Langanan Daya dan Jasa, Perawatan Sekolah, Pembayaran Honorarium Bulanan Guru Honorer dan Tenaga Kependidikan Honorer, Pengembangan Profesi Guru, Membantu Peserta Didik Miskin, Pembiayaan Pengelolaan BOS, Pembelian dan Perawatan Perangkat Komputer, dan Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s/d 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS.

Bagi sekolah yang telah menerima Dana Alokasi Khusus (DAK), tidak

diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama. Sebaliknya jika dana BOS tidak mencukupi untuk pembelanjaan yang diperbolehkan (13 item pembelanjaan), maka sekolah dapat mempertimbangkan sumber pendapatan lain yang diterima oleh sekolah, yaitu pendapatan hibah (misalnya DAK) dan pendapatan sekolah lainnya yang sah dengan tetap memperhatikan peraturan terkait.

Berdasarkan total dana pendidikan yang diterima oleh SMP Negeri 2 Sukasada untuk Tahun Pelajaran 2013/ 2014 adalah sebesar Rp. 398.302.733 yang berasal dari: 1) sisa TW II tahun 2013 sebesar Rp. 15.257.733, 2) TW III tahun 2013 sebesar Rp. 100.465.000, 3) TW IV tahun 2013 sebesar Rp. 91.235.000, 4) TW I tahun 2014 sebesar Rp. 95.672.500, dan 5) TW II tahun 2014 sebesar Rp. 95.672.500, dana yang terealisasi hanya sebesar 97,41% atau sebanyak Rp. 388.002.919. Dana tersebut dialokasikan untuk membiayai Program Pengembangan Sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 2 Sukasada untuk Tahun Pelajaran 2013/2014. Adapun program pengembangan sekolah yang dilaksanakan tersebut mengacu pada 8 Standar Nasional Pendidikan, yaitu: 1) Standar Pengembangan Kompetensi Lulusan, total dana yang dikeluarkan untuk program ini adalah sebesar Rp. 47.575.000, yang seluruhnya direalisasikan untuk membiayai Kegiatan Pembelajaran dan Ekstra Kurikuler Siswa. 2) Standar Pengembangan Kurikulum/ KTSP, total dana yang dikeluarkan untuk program ini adalah sebesar Rp. 4.077.500, yang direalisasikan untuk membiayai Pembelian Bahan Habis Pakai sebesar Rp. 27.500, Pengembangan Profesi Guru sebesar Rp. 2.950.000 dan Pengembangan Perpustakaan sebesar Rp. 1.100.000. 3) Standar Pengembangan Proses Pembelajaran, total dana yang dikeluarkan untuk program ini adalah sebesar Rp. 15.580.000, yang direalisasikan untuk membiayai Kegiatan PPDB sebesar Rp. 5.555.000, Pembelian Bahan Habis Pakai sebesar Rp. 7.025.000, Kegiatan Pembelajaran dan Ekstra Kurikuler Siswa sebesar Rp. 3.000.000. 4) Standar

Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, total dana yang dikeluarkan untuk program ini adalah sebesar Rp. 12.900.000, yang direalisasikan untuk membiayai Pengembangan Profesi Guru sebesar Rp. 11.550.000, Pembiayaan Pengelolaan Dana BOS sebesar Rp. 450.000, dan Biaya Lainnya Jika Komponen 1 s/d 12 Terpenuhi sebesar Rp. 900.000. 5) Standar Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah, total dana yang dikeluarkan untuk program ini adalah sebesar Rp. 125.588.950, yang direalisasikan untuk membiayai Pengembangan Perpustakaan sebesar Rp. 9.885.000, Kegiatan Pembelajaran dan Ekstra Kurikuler Siswa sebesar Rp. 4.380.000, Pembelian Bahan Habis Pakai sebesar Rp. 35.664.950, Perawatan Sekolah sebesar Rp. 53.150.000, Pembelian Perangkat Komputer sebesar Rp. 19.834.000 dan Langganan Daya dan Jasa sebesar Rp. 2.675.000. 6) Standar Pengembangan dan Implementasi Manajemen Sekolah, total dana yang dikeluarkan untuk program ini adalah sebesar Rp. 105.495.469, yang direalisasikan untuk membiayai Pembelian Bahan Habis Pakai sebesar Rp. 12.980.000, Langganan Daya dan Jasa sebesar Rp. 13.045.469, Pembayaran Honorarium Bulanan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer sebesar Rp. 72.600.000, Pembiayaan Pengelolaan Dana BOS sebesar Rp. 5.340.000 dan Pengembangan Perpustakaan sebesar Rp. 1.530.000. 7) Standar Pengembangan dan Sumber Dana Pendidikan, total dana yang dikeluarkan untuk program ini adalah sebesar Rp. 5.062.500, yang seluruhnya direalisasikan untuk membiayai Pembelian Bahan Habis Pakai. 8) Standar Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian, total dana yang dikeluarkan untuk program ini adalah sebesar Rp. 71.723.500, yang seluruhnya direalisasikan untuk membiayai Kegiatan Ulangan dan Ujian.

Dari deskripsi diatas dapat disimpulkan, bahwa satuan biaya pendidikan SMP Negeri 2 Sukasada pada Tahun Ajaran 2013/ 2014 yang berjumlah Rp. 398.302.733 hanya terealisasi sebanyak 97,41%, ini berarti bahwa total

biaya (*total cost*) yang diperlukan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri 2 Sukasada yang bersumber dari Pemerintah pada Tahun Pelajaran 2013/2014 adalah sebesar Rp. 388.002.919.

### **3. Analisis Besarnya Satuan Biaya Pendidikan (*unit cost*) per Siswa dan Rata-rata Satuan Biaya Pendidikan Lainnya pada SMP Negeri 2 Sukasada Tahun Pelajaran 2013/2014**

Biaya satuan (*unit cost*) dalam dunia pendidikan merupakan biaya satuan yang sangat penting dalam penentuan biaya untuk setiap siswa dalam menyelesaikan pendidikannya. Fattah (2009) mendefinisikan, bahwa "Biaya satuan per siswa adalah biaya rata-rata per siswa yang dihitung dari total pengeluaran sekolah dibagi seluruh siswa yang ada di sekolah (*enrollment*) dalam kurun waktu tertentu. Secara sederhana biaya satuan dihitung hanya dengan membagi seluruh jumlah pengeluaran sekolah dengan jumlah siswa yang aktif pada tahun tertentu.

Untuk data biaya pribadi yang diperlukan oleh setiap siswa di SMP Negeri 2 Sukasada pada Tahun Pelajaran 2013/2014, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa *total cost* yang diperlukan adalah sebesar Rp. 388.002.919, sedangkan dana utuh yang diterima sebesar Rp. 383.045.000 (tidak termasuk dana sisa dari TW II tahun 2013). Biaya pendidikan yang berasal dari dana BOS adalah sebesar Rp. 710.000/ siswa/ tahun yang pencairannya dilakukan per 3 bulan (TW) sebanyak 4 kali. Ini berarti bahwa dana yang diterima sebesar Rp. 177.500/ siswa/ TW. Adapun perinciannya penerimaan dananya sebagai berikut: 1) Untuk TW III tahun 2013 dana yang diterima sebesar Rp. 100.465.000 untuk 566 orang siswa, sehingga mendapatkan indeks sebesar Rp. 177.500/ siswa. Sementara dana yg dikeluarkan sebesar Rp. 108.881.129 dengan perhitungan indeks sebesar Rp.192.369,49/ siswa. 2) Untuk TW IV tahun 2013 dana yang diterima sebesar Rp. 91.235.000 untuk 514 orang siswa, sehingga mendapatkan indeks sebesar Rp. 177.500/ siswa. Sementara

dana yg dikeluarkan sebesar Rp. 97.205.281 dengan perhitungan indeks sebesar Rp. 189.115,33/ siswa. 3) Untuk TW I tahun 2014 dana yang diterima sebesar Rp. 95.672.500 untuk 539 orang siswa, sehingga mendapatkan indeks sebesar Rp. 177.500/ siswa. Sementara dana yg dikeluarkan sebesar Rp. 90.389.752 dengan perhitungan indeks sebesar Rp. 167.698,98/ siswa. 4) Untuk TW II tahun 2014 dana yang diterima sebesar Rp. 95.672.500 untuk 539 orang siswa, sehingga mendapatkan indeks sebesar Rp. 177.500/ siswa. Sementara dana yg dikeluarkan sebesar Rp. 91.526.757 dengan perhitungan indeks sebesar Rp. 169.808,45/ siswa.

Jika dana-dana tersebut di atas diakumulasikan maka total dana yang diterima dari BOS adalah sebesar Rp. 383.045.000, dan jika dibagi dengan jumlah siswa maka akan mendapatkan indeks sebesar Rp. 710.000/ siswa/ tahun. Sementara total dana yang dikeluarkan sebesar Rp. 388.002.919, dan jika dibagi dengan jumlah siswa maka akan mendapatkan indeks sebesar Rp. 718.992,26/ siswa/ tahun. Disini bisa kita ketahui bahwa terdapat selisih dana sebesar Rp. 8.992.26 dari dana yang diterima dan dana yang dikeluarkan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa satuan biaya pendidikan per siswa (*unit cost*) pada SMP Negeri 2 Sukasada Tahun Pelajaran 2013/2014 adalah sebesar Rp. 718.992.26.

### **4. Analisis Peningkatan Biaya Pendidikan dapat Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMP Negeri 2 Sukasada dari Tahun Pelajaran 2011/2012 sampai dengan 2013/2014**

Upaya meningkatkan mutu pendidikan merupakan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan nasional di samping prioritas yang lainnya, yaitu penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, pendidikan untuk memacu penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan peningkatan relevansi melalui kebijaksanaan, keterkaitan dan kesepadanan.

Dalam rangka meningkatkan mutu semua jenis dan jenjang pendidikan, maka

perhatian dipusatkan pada tiga faktor utama, yaitu: 1) kecukupan sumberdaya pendidikan untuk menunjang proses pendidikan dalam arti kecukupan adalah tersedianya jumlah dan mutu guru, maupun tenaga kependidikan lainnya, buku teks, perpustakaan dan sarana prasarana belajar, 2) mutu proses pendidikan itu sendiri dalam arti kurikulum dan pelaksanaan pengajaran untuk mendorong para siswa belajar yang lebih efektif, dan 3) mutu *output* dari proses pendidikan dalam arti keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh oleh siswa.

Bertitik tolak dari uraian di atas, secara jelas disadari bahwa faktor utama penentu mutu pendidikan berkaitan erat dengan masalah biaya. Dapat dikatakan bahwa kuatnya keadaan ekonomi suatu negara akan berpengaruh secara langsung atau tidak langsung terhadap pengalokasian sumber biaya pendidikan maupun terhadap kebijakan yang akan diambil dan dilaksanakan oleh suatu negara dalam bidang pendidikannya. Dengan demikian, maka biaya pendidikan merupakan faktor masukan yang sangat penting dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, dan menjalankan fungsi pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Perubahan biaya atau peningkatan biaya pendidikan yang terjadi pada SMP Negeri 2 Sukasada dari Tahun Pelajaran 2011/ 2012 sampai 2013/ 2014, dapat dilihat dari jumlah dana BOS yang diterima oleh SMP Negeri 2 Sukasada pada Tahun Pelajaran 2011/ 2012 adalah sebesar Rp. 377.720.000, sedangkan total cost yang dihabiskan sebesar Rp. 361.643.873, jadi terdapat saldo sebesar Rp. 16.076.127, dengan unit cost sebesar Rp. 679.781.72/ siswa/ tahun. Pada Tahun Pelajaran 2012/ 2013 dana yang diterima sebesar Rp. 409.670.000, sedangkan total cost yang dihabiskan sebesar Rp. 392.241.878, jadi terdapat saldo sebesar Rp. 17.428.122.00, dengan unit cost sebesar Rp. 679.795.28/ siswa/ tahun. Ini berarti terdapat peningkatan sebesar 0,02% dari tahun sebelumnya. Kemudian pada Tahun Pelajaran 2013/ 2014 dana yang diterima sebesar Rp. 398.302.733, sedangkan total cost yang dihabiskan sebesar Rp.

388.002.919, jadi terdapat saldo sebesar Rp. 10.299.814 dengan unit cost sebesar Rp. 718.992.26/ siswa/ tahun. Ini berarti terdapat peningkatan sebesar 5,77% dari tahun sebelumnya.

Seiring dengan peningkatan satuan biaya pendidikan, maka mutu pendidikanpun mengalami peningkatan. Ini dapat kita lihat dari hasil penelitian, bahwa secara umum rata-rata skor mutu pendidikan di SMP Negeri 2 Sukasada adalah sebesar 171,25 dengan simpangan baku sebesar 11,68. Hasil ini menunjukkan bahwa kecenderungan mutu pendidikan SMP Negeri 2 Sukasada dalam kategori sangat baik, yakni berada pada rentangan  $\bar{Y} \geq 156$ .

Selain itu, peningkatan mutu pendidikan di SMP Negeri 2 Sukasada juga tercermin dari prestasi akademik maupun non akademik. Ini dapat dilihat dari nilai tertinggi yang diraih pada Ujian Nasional selama 2 tahun terakhir. Untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia pada TP 2011/ 2012, nilai tertinggi yang diraih oleh siswa adalah 8,6. Kemudian pada TP 2012/ 2013 mengalami peningkatan sebesar 5,81% menjadi 9,1. Selanjutnya pada TP 2013/ 2014 meningkat sebesar 4,4% menjadi 9,5. Untuk mata pelajaran Bahasa Inggris pada TP 2011/ 2012, nilai tertinggi yang diraih oleh siswa adalah 8,6. Kemudian pada TP 2012/ 2013 tidak mengalami peningkatan yaitu tetap 8,6. Selanjutnya pada TP 2013/ 2014 meningkat sebesar 3,5% menjadi 8,9. Untuk mata pelajaran Matematika pada TP 2011/ 2012, nilai tertinggi yang diraih oleh siswa adalah 9,5. Kemudian pada TP 2012/ 2013 tidak mengalami peningkatan yaitu tetap 9,5. Selanjutnya pada TP 2013/ 2014 meningkat sebesar 2,11% menjadi 9,7. Untuk mata pelajaran IPA pada TP 2011/ 2012, nilai tertinggi yang diraih adalah 9,0. Kemudian pada TP 2012/ 2013 mengalami peningkatan sebesar 4,4% menjadi 9,4. Selanjutnya pada TP 2013/ 2014 meningkat sebesar 2,13% menjadi 9,6.

#### DAFTAR RUJUKAN

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Aryanto, Hasan. 2009. "Analisis Manfaat Biaya Pendidikan". <http://hasanaryanto.uinjkt.blogspot.com/2009/11/ekonomi-pendidikan-analisa-manfaat.html>. Diunduh November 2014.

El Hakim, Naufal. 2013. "Pengertian dan Definisi Pendidikan". <http://www.krum.puls.net/2013/03/pengertian-dan-definisi-pendidikan.html>. Diunduh November 2014.

Fattah, Nanang. 2000. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Koyan, W. 2011. *Asesmen dalam Pendidikan*. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha Press.

*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan*. 2008. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan*. 2013. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Susilawati, Ni Luh. 2014. *Analisis Biaya Pendidikan Pada SMP Cipta Dharma Denpasar Tahun Pelajaran 2012/2013*. Singaraja: Undiksha

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. 2003. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.